

OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI DESA WANTILAN KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG

Toto Kushartono, Siti Munawaroh, Dadan Kurnia, Agustina Setiawan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Community service carried out aims to increase the knowledge, abilities, and skills of village officials in smart villages to regulate government at the village level. Human Resources is an important factor in an organization. With various objectives, organizations that are created based on various visions for the benefit of the organization and in carrying out its mission are managed and managed by employees. The application of village-level smart villages as a form of village digitization so that villages become smart and independent villages. This activity is carried out in three stages, namely the preparation stage for the socialization of activities to village officials, the implementation stage is carried out by delivering material, focus group discussions (FGD) and training or tutors, the last stage is evaluation by asking participants about knowledge related to smart villages. The results showed that participants understood smart villages but still needed coaching for training.

Keywords: Smart Village, Human Resources, Village Government.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan perangkat desa dalam smart village untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sumber Daya Manusia adalah faktor penting dalam suatu organisasi. Dengan berbagai bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan organisasi dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh pegawai. Penerapan smart village tingkat desa sebagai wujud dari digitalisasi desa sehingga desa menjadi desa cerdas dan mandiri. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahap persiapan berupa sosialisasi kegiatan kepada perangkat desa, tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara penyampaian materi, focus group discussion (FGD) dan pelatihan atau tutor, tahap terakhir yaitu evaluasi dengan menanyakan kepada para peserta mengenai pengetahuan terkait smart village. Hasilnya menunjukkan peserta paham dengan smart village namun memang masih memerlukan pembinaan ke depannya.

Kata kunci: Smart Village, Sumber Daya Manusia, Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan dan kapasitas aparatur desa memegang peranan yang sangat penting. Dengan kompleksitas permasalahan yang

dihadapinya, aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dari aparatur desanya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit terwujud jika kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. Namun demikian sampai saat ini secara umum kapasitas perangkat desa belum diketahui secara pasti.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa juga turut mengatur pengembangan kapasitas pemerintahan desa melalui manajemen desa yang mencakup: (1) kebijakan pemerintahan desa, (2) perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan kebijakan penyusunan peraturan di desa. Menurut (Antono 2016) menyebutkan bahwa kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 mencakup dalam: (1) Menata struktur pemerintahan desa sesuai karakteristik masing-masing desa; (2) Kemampuan akunting (*accounting*) perangkat desa; (3) Kemampuan melakukan akuntabilitas pelaporan keuangan; (4) Kemampuan

meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan terkait dengan pemerintahan desa; (5) Kemampuan mempersiapkan pembangunan desa yang cermat, termasuk di dalamnya keseluruhan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan (6) Kemampuan Menyusun membenahi system informasi desa yang meliputi informasi kependudukan dan social, neraca sumber daya, kondisi geografis dan topografi desa, informasi tentang aktivitas ekonomi, pasar dan unit usaha masyarakat serta keterkaitan interregional.

Salah satu Langkah yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meningkatkan literasi dan pemahaman digital ditingkat pemerintahan terendah yakni desa adalah dengan meluncurkan program desa cerdas (*smart village*). Desa harus menaruh perhatian pada perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini, terlebih penguasaan teknologi informasi yang menjadi salah satu indicator kemajuan bagi suatu negara. Desa sebagai bagian dari negara sudah seharusnya mulai menerapkan teknologi informasi mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pengelolaan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya bahkan juga dalam bidang pembangunan desa.

Penerapan teknologi di desa sejalan dengan berkembangnya konsep pembangunan desa berbasis teknologi informasi yang biasa disebut *smart village*. Konsep *smart village* adalah desa yang menerapkan teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani memiliki kepedulian untuk dapat mewujudkan program yang

telah dibuat oleh pemerintah serta untuk membantu desa (masyarakat), yaitu dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian harapannya adalah desa binaan tersebut mampu untuk menjadi desa mandiri, dan outputnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini melihat rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sehingga menjadi permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan dimensi dinamis dan unik karena setiap manusia memiliki sifat, karakter, motivasi dan emosi yang berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan/*manage* yang berbeda pula untuk setiap personalnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumberdaya-sumberdaya lainnya.

Oleh karena itu salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi dan mengendalikan sumberdaya-sumberdaya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahanan desa untuk mewujudkan *smart village* pada level desa perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa. Manajemen/ pengelolaan SDM aparatur pemerintah desa ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera dalam pencapaian birokrasi di tingkat pemerintahan desa yang baik. Sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum di desa, SDM

aparatur desa di Desa Wantilan masih belum sepenuhnya professional.

Tujuan pengembangan sumber daya manusia mempunyai dua dimensi yaitu dimensi individual dan dimensi institusional. Tujuan yang berdimensi individual mengacu kepada sesuatu yang dicapai oleh seorang pegawai. Tujuan berdimensi institusional mengacu kepada apa yang dapat dicapai oleh organisasi. Pengembangan sumber daya aparatur sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan aparatur baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdianya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja seorang aparatur (Rivai, 2009)

Hal ini menjadi perhatian bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani untuk memberikan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, dengan harapan bahwa aparatur desa nantinya mampu lebih optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga mampu untuk lebih kreatif serta inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi melalui teknologi informasi, untuk mengoptimalkan potensi desa menuju desa mandiri.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa akan mampu menjadi desa mandiri yaitu dengan adanya *smart village*. Dengan menetapkan sistem *smart village* diharap mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah dapat berhubungan dengan masyarakat melalui media-media elektronik, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.

Smart village merupakan sebuah pengembangan dari konsep smart city. yang diaplikasikan pada wilayah pedesaan agar desa dapat

menyelesaikan permasalahannya dengan cerdas. Smart village digagas untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi di suatu desa saja smart village juga diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya sebuah inovasi dalam usaha kecil yang berpotensi menciptakan kewirausahaan, meningkatkan partisipasi masyarakat di desa (Nuraini, Larasati, Suwitri, & Nugraha, 2021)

Mengadopsi dari konsep *smart city* maka *smart village* memiliki dimensi yang jelas untuk mengatasi permasalahan di pedesaan, seperti *smart people*, *smart living*, *smart environment*, *smart government*, *smart economics*, *smart mobility* (Subekti & Damayanti, 2019). Berbeda dengan pengembangan smart city, pengembangan smart village harus dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan adanya dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai alat atau “tools” dalam upayanya mewujudkan keinginan tersebut dan bukan sebagai tujuan atau “goals”. Dari pemahaman tersebut, maka pengembangan smart village didasarkan kepada pendekatan dari bawah “bottom-up” atas prakarsa

dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator (Herdiana, 2019).

Smart village dinilai akan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa serta permasalahan lain seperti pelayanan publik yang buruk serta sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi desa (Marlintha et al., dalam (Maharani & Kencono, 2021)). Selain itu, dalam hal pembangunan desa Pemerintah desa juga harus memenuhi kebutuhan desa sesuai dengan paradigma “Desa Membangun” prinsipnya adalah desa memiliki kewenangan salah satunya kewenangan nyata untuk mengelola public goods seperti jalan desa, kesehatan, pendidikan, air bersih dan lain – lain.

Smart village tidak hanya ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat melainkan untuk mengintegrasikan seluruh elemen desa menjadi sebuah sistem yang kuat sehingga mampu memainkan peranan penting dalam membantu pencapaian tujuan (Sirsat & Sirsat dalam (Saidah, Khasanah, Asriyatuzahra, & Ridloah, 2022)).

Seiring luasnya pemanfaatan teknologi informasi baik di lingkup pemerintah hingga menyebar ke seluruh masyarakat telah mampu mendorong beberapa desa untuk melakukan transformasi struktural menjadi smart village melalui integrasi berbagai elemen-elemen pendukung kesinambungan pedesaan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi (Herdiana, 2019)

METODE

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang”, Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dalam berbagai bentuk atau tahapan kegiatan yang dilakukan, antara lain meliputi:

1. Tahap Persiapan; dalam tahap persiapan ini penyelenggara kegiatan pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani melakukan sosialisasi terkait akan diselenggarakannya kegiatan ini. Sosialisasi dilakukan kepada Kepala Desa Wantilan dan seluruh aparaturnya Pemerintah Desa Wantila, serta BUMdes. Tahap persiapan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.
2. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” dilaksanakan pada hari Selasa, 20 September 2022 melalui metode konvensional/ luring atau tatap muka yang bertempat di Balai Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *offline* dengan jumlah peserta 30

orang dari unsur aparaturnya pemerintah desa, Bumdes, BPDes, dan PKK.

3. Tahap Evaluasi; pada tahap kegiatan ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengevaluasi seluruh kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan kegiatan sampai kepada luaran kegiatan termasuk dalam perihal publikasi hasil kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:

1. Waktu Kegiatan
 - a. Proses persiapan. Proses kegiatan Pengmas secara keseluruhan dilaksanakan secara selama 3 bulan penuh, dari mulai pembuatan proposal, pengiriman informasi tentang kegiatan.
 - b. Pengiriman informasi dilakukan secara resmi melalui surat kepada Kepala Desa Wantilan.
 - c. Kegiatan puncak dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 mulai pukul 07.30 sd 17.30 WIB.
2. Sifat dan Tempat Kegiatan
 - a. Kegiatan PPM dengan judul “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan

Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” ini dilaksanakan bersifat *offline* atau *luring* atau secara tatap muka langsung.

- b. Tempat kegiatan PPM dengan judul “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” di Balai Desa Wantilan.
3. Peserta kegiatan
 - a. Peserta kegiatan PPM dengan judul “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebanyak 30 orang yang merupakan unsur aparatur pemerintah desa, Bumdes, BPDes, dan PKK.
 4. Pemateri

Pemateri dalam kegiatan “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:

Dr. Agustina Setiawan, S.IP., M.Si, membahas mengenai menajamen sumber daya manusia perangkat desa dalam menjalankan *smart village*.
 5. Materi Kegiatan dalam “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan

smart village di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:

Pada penyampaian materi, pemateri menyampaikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan *smart village*. *Smart village* adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan desa bisa melakukan berbagai capaian terobosan sehingga memenuhi kualifikasi untuk masuk kategori Desa Mandiri. Adapun manfaat dari *smart village* yang dapat dirasakan yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan

adanya teknologi informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah seperti jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang sesuai untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan *video conference*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Pemanfaatan IT untuk pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan produk atau servis IT

Di Indonesia banyak programmer yang kreatif akan tetapi sayangnya belum menemukan saluran yang pas. Masih banyak produk yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, larangan ekspor produk teknologi kriptografi (seperti enkripsi), yang banyak digunakan dibidang *security* dan *commerce*.

2. IT untuk Pelayanan

Menggunakan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbesar pelayanan melalui Internet. Cara yang paling mudah adalah membuat homepage (website) untuk institusi pemerintahan. Banyak tempat yang menyediakan homepage secara gratis. Selain itu program-program komputer untuk memudahkan membuat homepage sudah banyak tersedia. Demikian mudahnya dan mudahnya membuat sebuah homepage sehingga tidak alasan sebuah institusi pemerintah, untuk tidak memiliki home-page. Memiliki homepage hampir dapat disamakan dengan memiliki telepon dan fax dalam bisnis, yaitu menjadi kompo-nen yang sangat esensial

3. Kualitas Pelayanan

Yang paling dituntut publik saat ini adalah masalah kualitas pelayanan dari kantor-kantor Pemerintah. Dengan meng-gunakan IT, aparatur pemerintah lebih mudah dalam mencari

informasi yang dapat membantu meningkatkan produksinya. Salah satu contoh adalah menggunakan search engine untuk melihat paten yang sudah atau hampir habis masanya, atau menggunakan email untuk menghubungi pakar untuk tukar informasi atau konsultasi. Hal ini sangat bermanfaat bila konsultan tersebut secara fisik berlokasi jauh, sehingga mahal untuk mendatangkan atau mendatangi konsultan tersebut.

4. Meningkatkan Kinerja

IT dapat untuk meningkatkan kinerja institusi pemerintahan. Sebagai contoh, LAN atau Intranet dapat dipasang di institusi pemerintahan untuk mempercepat proses pertukaran informasi dalam bentuk email, file sharing. Institusi pemerintah pun juga memerlukan IT. Inisiatif Telematika Indonesia dalam bentuk email terbuka RINet merupakan salah satu contoh penggunaan IT di instansi pemerintah.

5. Tenaga Kerja IT

Menghasilkan tenaga kerja yang terampil di bidang IT. Tenaga kerja ini dapat diekspor ke luar negeri yang masih membutuhkan SDM-SDM yang terampil di bidang IT

6. Hasil *Focus Group Discussion* Kegiatan dalam “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan

smart village di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:

1. Pengelolaan sosial media secara berkala. Khususnya dalam publikasi di sosial media, membuat narasi dan konten yang menarik masyarakat umum untuk melihat dan membaca.
2. Website resmi pemerintah desa agar rajin diakses masyarakat
3. Masyarakat umum khususnya pelaku usaha mampu mempromosikan produknya di *e-commerce* baik tingkat nasional maupun tingkat internasional
7. Tahapan pelaksanaan kegiatan PPM. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan PPM ini merupakan tahapan pemberian materi kegiatan yang terbagi atas:
 - a. Pemberian materi tentang *smart village*
 - b. Materi FGD



Gambar 2. Sesi *Focus Group Discussion*

8. Beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan PPM ini
 - a. Kepala Desa Wantilan

- b. Perangkat Desa Wantilan
- c. BUMDes
- d. BPDes
- e. PKK
- f. Pimpinan Universitas
- g. Pimpinan Fakultas
- h. Tim Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Unjani sebagai penyelenggara kegiatan PPM
- i. Perwakilan mahasiswa Prodi IP FISIP Unjani

Dengan berbagai bentuk atau metode yang diberikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” ini, alhasil mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa di Desa Wantilan sebagai modal awal dalam menata organisasi pemerintahan termasuk organisasi Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam era globalisasi dan digitalisasi. Penerapan Teknologi Informasi dalam organisasi pemerintahan saat ini sudah merupakan keharusan melekat teknologi. Sumber daya aparatur harus mampu mengoperasikan system berbasis digital dalam pemberian pelayanan yang maksimal ke masyarakat.

Kecanggihan teknologi saat ini di dunia organisasi pemerintahan sudah merubah sistem pelayanan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik dalam tata Kelola Sumber Daya Manusia. Peran Teknologi informasi dalam pemerintahan sangat lah besar dan hal ini harus diimbangi dengan kesiapan para aparatur sebagai pelaksanaan suatu sistem dalam organisasi pemerintahan Desa ini.

Melalui pelatihan ini diharapkan mampu membekali dan ikut mempersiapkan para aparatur pemerintah desa dalam peningkatan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam organisasi pemerintahan desa tersebut. Terdeskripsikan dengan jelas bahwa diskusi yang terjadi dalam kegiatan “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan *smart village* di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” tersebut khususnya saat ini sudah menjadi keharusan melekat teknologi dalam rangka kesiapan menghadapi arus globalisasi dan digitalisasi.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, digitalisasi desa, *smart village* dan *e-government*, Kegiatan ini secara umum memberikan kontribusi kepada peserta untuk membangun desa cerdas dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan dan memajukan Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari hibah internal Unjani, yang pendanaan bersumber dari LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Oleh karena itu tim dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unjani atas kepercayaan dan pendanaan yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages. *IPTEK - KOM*, 21(1), 1-16.
- Maharani, E. N., & Kencono, D. S. (2021). Penerapan Smart Governance dalam Smart Village di Kelurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 5(2), 25-38.
- Nuraini, H., Larasati, E., Suwitri, S., & Nugraha, H. S. (2021). Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid -19. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 6(4), 862-873.
- Rivai, V. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Saidah, N., Khasanah, L., Asriyatuzahra, & Ridloah, S. (2022). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 6(2), 123-135.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *JPALG: Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18-28.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa